

Peningkatan Pemahaman Pemilih Pemula Mengenai Pemilu di SMK Mandiri Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat

Sadariah Saragih, Nazimin Saily, Indiana

Ngenget, Mustafa M.¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Abstrak

Pemilih pemula merupakan pemilih yang potensial untuk diraih suaranya bagi kemenangan setiap calon presiden, kepala daerah ataupun caleg yang mencalonkan diri pada pemilu. Pemilih pemula yaitu para remaja atau anak muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dianggap sebagai kelompok yang belum memiliki keterikatan pada salah satu partai ataupun kelompok-kelompok kepentingan yang berafiliasi pada partai. Mengingat posisi mereka yang dianggap masih netral dan berpotensi diperebutkan oleh partai-partai dengan cara yang benar ataupun tidak dapat dibenarkan oleh UU maka sebagai lembaga pendidikan kiranya kita perlu memberikan pemahaman yang baik kepada para pemilih pemula dalam hal ini yang berada di bangku sekolah menengah atas tentang pemilu dan keberadaan mereka sebagai pemilih pemula. Materi sosialisasi antara lain berkisar pada pemahaman tentang pemilu, tujuan pemilu, posisi pemilih pemula, pelanggaran dalam pemilu seperti *black campaign*, *money politics* ataupun tentang golput. Dengan adanya sosialisasi kepada pemilih pemula diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ataupun pemahaman mereka tentang pemilu.

Beginner voters are potential voters to get their votes for the victory of every presidential candidate, regional head or candidate who runs for the election. Beginner voters, namely teenagers or young people who will first use their voting rights in elections, are considered as a group that does not have an attachment to either party or interest groups affiliated to the party. Considering the position of those who are considered still neutral and potentially contested by the parties in a way that is right or cannot be justified by the Act, as an educational institution we need to provide a good understanding to the beginner voters in this case who are in high school about elections and their existence as beginner voters. The socialization material, among others, revolves around the understanding of elections, the purpose of the election, the position of first-time voters, violations in elections such as black campaign, money politics or about abstentions. With the introduction of information to beginner voters, it is hoped that they can increase their knowledge or understanding of the election.

Key words: Elections, Beginner Voters

I. Pendahuluan

Mulai tahun 2015, pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia memasuki

babak baru. Selain waktu penyelenggaraan yang berbeda dengan periode sebelumnya, sejumlah ketentuan baru telah ditetapkan

¹ Alamat: Kampus IISIP Jakarta Jl.Raya Lenteng Agung No.32 Jakarta Selatan 12610. Tel. 021-7806223, 7806224. Fax.021-7817630

dalam regulasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ketentuan itu dapat disimak dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan UU No.8 tahun 2015 tentang perubahan UU No. 1 tahun 2015, serta peraturan komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2015.

Salah satu poin penting babak baru penyelenggaraan pemilihan kepala daerah saat ini adalah waktu penyelenggaraan yang dilaksanakan secara serentak (pasal 3 dan 201 UU No 8 tahun 2015). Pilkada dipahami sebagai proses demokrasi lokal yang bersifat nasional. Oleh karena itu waktu penyelenggaraan Pilkada didesain dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015 dan bertahap menuju keserentakan secara nasional tahun 2027. Hal ini menyusul dengan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa pemilu legislatif dan pemilu Presiden harus dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019.

Terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, maka kabupaten Bogor adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada 2018. Pada dasarnya penyelenggaraan pilkada di kabupaten Bogor sama dengan penyelenggaraan pilkada di daerah lainnya di Indonesia.

Sebagaimana pada pemilu-pemilu sebelumnya, pilkada serentak pada tahun 2018 ini di kota dan kabupaten Bogor juga melibatkan para pemilih pemula, yaitu warga negara yang baru pertama ikut pemilihan umum. Hal ini ditandai dengan usia mereka yang menginjak 17 tahun dan mendapat KTP sebelum penyelenggaraan pemilu.

Pada pemilu yang akan datang jumlah pemilih pemula secara nasional pada pilpres 2019 mendatang telah dirilis oleh KPU RI (www.kpu.go.id) yaitu diperkirakan berada di kisaran 20-30 % dari jumlah

pemilih dalam pemilu mendatang. Melihat besarnya jumlah pemilih pemula dalam pemilu mendatang maka perlu kiranya dipahami bahwa pemilih pemula berpotensi menjadi “rebutan” kekuatan-kekuatan politik ataupun partai-partai politik yang bertarung dalam pemilu.

Kekuatan-kekuatan politik ataupun partai-partai politik menganggap suara pemilih pemula dengan jumlah yang cukup banyak tersebut adalah kelompok pemilih yang mudah dipengaruhi atau bahkan dimobilisasi mengingat pengalaman mereka yang minim dalam berpolitik, termasuk dalam menentukan pilihan ketika harus mencoblos di kotak suara.

Dengan kondisi mereka yang belum pernah memilih, para pemilih pemula biasanya menjadi sasaran para kontestan pemilu maupun partai politik pendukung kontestan guna mendapatkan suara dari para pemilih pemula tersebut. Para kontestan dan partai politik pendukung menganggap bahwa para pemilih pemula adalah warga negara yang mayoritas belum memiliki orientasi politik tertentu dan belum terikat dengan salah satu partai atau ikatan-ikatan politik lainnya. Para pemilih pemula dianggap belum tertarik pada masalah politik sehingga dianggap mudah untuk diajak dan dipengaruhi untuk mendukung dan memilih kontestan tertentu dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para kontestan dan partai pendukungnya untuk mendekati para pemilih pemula.

Upaya yang dilakukan oleh para kontestan dan partai pendukungnya akan semakin gencar saat masa kampanye, di mana partai akan memperkenalkan/mempromosikan pasangan calon presiden/wakil presiden atau para calon legislatif yang mereka dukung. Dalam pilkada maka partai politik akan memperkenalkan dan mempromosikan calon kepala daerah yang didukung partai tersebut.

Pemilih pemula sebagai pemilih yang

baru pertama kali ikut pemilu dan dianggap belum memiliki keterikatan dengan partai atau kekuatan politik manapun menjadi perhatian dari beberapa instansi terkait, seperti KPU, KPUD, bahkan lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus untuk turut memberikan pemahaman yang memadai tentang pemilu dengan tujuan agar mereka memiliki kesadaran untuk memanfaatkan hak pilihnya dengan benar, dan tidak menjadi sasaran dan kampanye negatif para peserta pemilu.

Pemahaman tentang siapa dan apa yang dimaksud dengan pemilih pemula masih kurang dipahami oleh para anak muda yang menjadi pemilih pemula itu sendiri. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak suara untuk mengikuti pemilihan umum untuk pertama kalinya. Pada umumnya mereka dianggap sebagai pemilih yang masih mudah dipengaruhi karena minimnya pengalaman dan pengetahuan tentang pemilu dan politik pada umumnya.

Dalam menghadapi rendahnya pemahaman pemilih pemula tentang pemilu dan pilkada, beberapa KPUD di daerah tertentu seperti di kabupaten Cilacap melakukan upaya sosialisasi kepada pemilih pemula dengan tema "Penyuluhan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Rangka Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Cilacap" (<http://kpudcilacapkab.go.id/assets///2016/>). Dalam kegiatan tersebut juga diungkapkan bahwa pemilih pemula selain masih memiliki pemahaman yang rendah tentang pemilu juga bersikap cenderung pasif atau enggan untuk memberikan hak suaranya.

II. Tinjauan Teori

2.1. Pemilu

Pemilihan umum merupakan salah satu dari tonggak demokrasi, melalui pemilu pemimpin dipilih secara teratur untuk

masa jabatan tertentu. Henry B.Mayo (Budiarjo, 2008) memasukkan pergantian kepemimpinan secara teratur (suksesi kepemimpinan) dalam pembahasannya tentang nilai-nilai demokrasi. Adapun wadah bagi suksesi secara teratur pada negara-negara demokrasi adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara teratur dalam periode-periode yang telah ditetapkan.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana untuk memilih pemimpin negara (kepala negara ataupun kepala pemerintahan, wakil rakyat maupun kepala daerah). Pemilihan Umum di Indonesia meliputi :

Pemilihan Presiden (Pilpres) yaitu kegiatan pemilu dimana rakyat Indonesia secara langsung dan serentak memilih seorang kepala Negara/pemerintahan dari beberapa calon presiden.

Pemilihan anggota legislatif (Pileg) yaitu kegiatan pemilu dimana rakyat secara langsung dan serentak memilih calon wakil rakyat yang akan mewakili mereka maupun daerah mereka untuk duduk di Parlemen pusat yaitu DPRI serta orang-orang yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif di daerah mereka atau anggota DPRD.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih kepala daerah provinsi, kabupaten/kota.

2.2. Tujuan Pemilu.

Hal lain yang perlu diketahui oleh pemilih dalam pemilu termasuk pemilih pemula adalah tujuan dari pemilu itu sendiri. Jimly Asshiddiqie (Sukriono, 2009) menyatakan ada empat tujuan diselenggarakannya pemilu, yaitu :

untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;

untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;

untuk melaksanakan prinsip kedaulatan

rakyat;

untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemilih pemula kiranya perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pemilu serta tujuan dari pemilu, untuk itu konsep pemilu ini akan menjadi bagian dari kuesioner untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui dan memahami pemilu.

2.3. Golongan Putih (Golput)

Pemahaman tentang definisi dari golongan putih atau yang biasa dikenal dengan golput juga merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat termasuk oleh pemilih pemula. Suka Arjawa dalam penelitiannya mengenai Pemilih Pemula (<http://apssi-sosiologi.org/wp-content/uploads/2014/>) dengan judul “Lemahnya Pemahaman Tentang Golput” mengatakan bahwa dari hasil penelitiannya diketahui bahwa para pemilih pemula tidak memahami konsep Golput,

Mereka mengatakan bahwa golongan putih itu adalah sikap tidak memilih dalam pemilu. Lebih jelas lagi, yang dimaksudkan dengan golongan putih tersebut adalah tinggal di rumah, tidak datang menuju tempat pemungutan suara pada saat diselenggarakannya pemilu. Para generasi muda ini sangat yakin, itulah yang dimaksud dengan golongan putih, yaitu tidak ikut mencoblos dalam pemilu. Terhadap konsep golongan putih, secara konsepsional, seluruh responden tidak tahu secara jelas apa yang dimaksud dengan golongan putih

Kepada generasi muda ini bahwa yang dimaksudkan dengan golongan putih (golput) merupakan sikap para pemilih yang tidak mencoblos gambar atau nama yang ada pada kertas suara, tetapi justru mencoblos pada bagian putih dari kertas suara tersebut. Masyarakat tetap datang menuju tempat pemilihan suara, masuk menuju ruangan. Akan tetapi mencoblos atau mencontreng bagian putih dari kertas suara. Ide dari

golongan putih ini dikemukakan oleh salah seorang intelektual kritis Indonesia, yaitu Arief Budiman pada dekade tujuh puluhan akhir dan awal dekade delapan puluhan

Pengamat Politik Arbi Sanit (<http://golputbukandosa.blogspot.co.id>) mengatakan golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan. Masyarakat yang disebut Golput adalah mereka yang menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan, yaitu :

menusuk lebih dari satu gambar partai (pasangan calon)

Menusuk bagian putih dari kertas suara

Tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih

Jadi golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu.

Pemahaman tentang golput juga disampaikan oleh pengamat politik lainnya, menurut Novel Ali (<http://golputbukandosa.blogspot.co.id>) ada beberapa golongan putih yaitu :

kelompok golput awam yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik tetapi karena alasan ekonomi seperti kesibukan dan lainnya. Kemampuan kelompok ini tidak sampai pada kemampuan analisis namun hanya sampai tingkat deskriptif saja.

Kelompok golput pilihan yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai atau menginginkan adanya organisasi politik lainnya, kemampuan mereka telah sampai pada tingkat evaluatif.

Terkait dengan Golput Eep Saeful Fatah (Setiajid, 2011) menggolongkan golput menjadi empat bagian, yaitu :

Golput teknis yaitu mereka yang golput karena hal hal teknis seperti ketiduran, atau

berhalangan hadir karena alasan yang lain;

Golput teknis politis mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (penyelenggara pemilu, dll);

Golput politis yaitu mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan;

Golput ideologis yaitu mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan fundamental agama atau alasan politik-ideologi lainnya.

Dalam penelitian inipun konsep golongan putih atau Golput akan digunakan sebagai pengukur pengetahuan dan pemahaman pemilih pemula tentang hal terkait pilkada.

4. Money Politic (Politik Uang)

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan definisi *Money Politic* atau politik uang sebagai tindakan mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.(dictio.com).

Dalam prakteknya imbalan tersebut dapat dilakukan secara nyata dengan membagi-bagi uang, sembako, dan lainnya secara langsung kepada warga namun dapat juga dengan mengatasnamakan sebuah kegiatan, antara lain kegiatan jalan sehat, pengajian, bakti sosial, dan lainnya.

Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menyebut setidaknya ada tiga praktek politik uang yang biasa terjadi dalam pemilu, yaitu politik uang pertama adalah membeli kursi dalam bentuk mahar terhadap partai politik. Kedua, membeli kesempatan dan kekebalan hukum, agar penyelenggara pemilu, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan kegiatan praktik uang yang dilakukannya. Ketiga, membeli suara rakyat (amp-tirto.id.cdn.amproject.org).

Politik uang merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang membutuhkan keterlibatan massa pemilu untuk mau melaporkan terjadinya tindak pelanggaran tersebut. Massa sebagai pihak yang menerima imbalan guna melakukan tindakan tertentu untuk kemenangan pemberi imbalan tentu perlu mengetahui sejauh mana pemberian imbalan tersebut dapat dibenarkan dalam hukum atau justru sebuah pelanggaran hukum. Sosialisasi tentang *money politic* tentu akan mampu meningkatkan pemahaman massa tentang hal ini

III. Metode Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan menjawab kuesioner.

Materi ceramah meliputi :

1. Manfaat sosialisasi pemilu

Sebagai sarana bagi masyarakat/pelajar untuk belajar mengetahui tentang pemilu dan kegunaannya sistem politiknya.

2. Pemilu dan hal yang terkait pemilu :

- Pemilu demokratis.
- Tujuan pemilu : sebagai wujud kedaulatan rakyat guna menghasilkan kepala daerah ataupun kepala negara yang baik, ataupun wakil-wakil rakyat yang membela kepentingan rakyat.

3. Jenis-jenis Pemilu

4. Partai Politik sebagai sarana untuk berpolitik dan “mendekati rakyat”

5. Partisipasi

- Memantau penghitungan suara di TPS
- Menyampaikan laporan pelanggaran, penyimpangan
- Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara

6. Pemilih pemula

Siapa yang dimaksud pemilih pemula : pelajar, mahasiswa, atau warga negara yang telah memilih hak pilih (usia 17

tahun atau telah menikah) dan baru pertama kali dapat menggunakan hak pilihnya.

7. Karakter pemilih pemula

- Kritis
- Idealis
- Independen
- Pro perubahan
- Rasional

8. Golongan Putih (Golput)

9. Pelanggaran-pelanggaran Pemilu :

- *Money Politic*
- *Black Campaign*

IV. Hasil dan pembahasan

4.1 Hasil

Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan bahwa kegiatan PKM ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMK Mandiri Bojong Gede, kabupaten Bogor, Jawa Barat tentang pemilu yang meliputi pilkada, pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Untuk mencapai tujuan tersebut maka tim dosen yang melaksanakan PKM telah menyiapkan materi terkait peningkatan pemahaman sebagaimana diurai pada tinjauan teori.

Untuk mengetahui sejauhmana sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman maka sebelum menyampaikan materi, para siswa diminta untuk mengisi kuesioner, kemudian tim menyampaikan materi sosialisasi yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah selesai sosialisasi dan tanya jawab, tim kembali menyebarkan kuesioner dengan pertanyaan yang sama. Peserta sosialisasi mencapai 66 siswa, berikut ini adalah hasil dari pemahaman siswa sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi.

4.2 Pembahasan

Selain hal tersebut di atas ditanyakan dalam kuesioner, tim juga menanyakan beberapa hal lainnya yang terkait dengan

pemilu secara lisan, baik dalam sesi penyampaian materi maupun sesi diskusi. Pertanyaan tersebut antara lain tentang *money politik*, *black campaign*, golput serta pengetahuan mereka tentang calon-calon peserta pilkada kab.Bogor.

Pertanyaan mengenai pengetahuan siswa tentang calon-calon kepala daerah diajukan kepada siswa secara lisan seiring dengan penyampaian materi. Ketika ditampilkan gambar 5 pasang calon kepala daerah kabupaten Bogor dan tim menanyakan siapa saja yang mereka kenal dari para calon tersebut, maka dengan serempak mereka menunjuk dan menyebut nama Ade Yasin. Ketika ditanyakan dari mana mereka mengenal nama Ade Yasin mereka serempak menjawab dari sekolah, beberapa di antaranya ada yang menambahkan dari orang tua.

Pertanyaan lain yang diajukan ketika presentasi dan diskusi adalah mengenai pemahaman mereka tentang *money politik* dan *black campaign*. Ketika ditanyakan kepada para siswa beberapa di antaranya menjawab contoh *black campaign* adalah berita-berita hoax di media sosial sedangkan *money politik* adalah bagi-bagi uang menjelang hari pencoblosan. Melihat reaksi siswa yang menjawab tidak serempak maka ini menjadi masukan bagi tim untuk kegiatan berikutnya bahwa pertanyaan tentang *money politik* dan *black campaign* akan ditanyakan secara tertulis atau dimasukkan dalam kuesioner sehingga lebih dapat diukur.

Berdasarkan Tabel 1 maka dapat kiranya dianalisis pemahaman dari siswa-siswa tentang pemilu dan pemilih pemula :

Bila dilihat dari persentase siswa yang mengetahui apa yang dimaksud dengan pemilih pemula sebelum sosialisasi yang hanya 37 % maka dapat dikatakan tidak banyak dari siswa mengetahui apa makna dari pemilih pemula. Beberapa yang menjawab tahu, menyebutkan makna dari

pemilih pemula yaitu orang yang baru pertama kali ikut pemilu, beberapa yang lain menjawab karena telah mencapai usia 17. Setelah sosialisasi, siswa yang menjawab tahu apa yang dimaksud dengan pemilih pemula mencapai 90%, dan mayoritas menjawab pemilih pemula adalah orang yang baru pertama menggunakan hak pilihnya karena memang baru memiliki hak pilih setelah usia 17 tahun.

Sebelum sosialisasi siswa yang memahami apa yang dimaksud dengan pemilu telah mencapai 54 %. Ketika ditanyakan dari mana mereka mengetahuinya, serempak mereka menjawab dari sekolah. setelah sosialisasi siswa yang menjawab tahu apa yang dimaksud dengan pemilu mencapai 83 %. Tidak tercapainya angka 100 % untuk dua pertanyaan tersebut setelah sosialisasi (dan mungkin juga pertanyaan-

Tabel 1. Pengetahuan Pemilih Pemula Tentang Pemilu

No.	Pertanyaan	Tahu/Bisa Menjawab Benar	
		Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi
1.	Apakah anda tahu apa yang dimaksud dengan pemilih pemula	37%	90%
2.	Apakah anda tahu apa yang dimaksud dengan pemilihan umum	54%	83%
3.	Apakah anda tahu apa yang kaitan pemilu dengan demokrasi	15%	80%
4.	Apakah anda tahu apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat	13%	71%
5.	Apakah anda tahu apa kaitan kedaulatan rakyat dengan pemilihan umum	13%	65%
6.	Apakah anda tahu tujuan pemilihan umum	65%	97%
7.	Apakah anda tahu apa yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah (pilkada)	48%	94%
8.	Apakah anda tahu apa yang dimaksud dengan golongan putih (golput)	23%	92%
9.	Menurut anda apa yang merupakan tindakan golput	7%	88%
10.	Apakah anda tahu yang dimaksud dengan partisipasi politik	13%	85%
11.	Apakah anda tahu kaitan antara partisipasi politik dengan pemilu	10%	73%
12.	Apakah anda tahu tujuan dari partisipasi politik	7%	65 %

pertanyaan berikutnya), setelah ditanyakan dan dicermati oleh tim ada yang menjawab karena mereka lupa dengan penjelasan atau tadi kurang memperhatikan.

Sebelum sosialisasi pengetahuan tentang kaitan antara pemilu dengan demokrasi ternyata sangat sedikit dipahami oleh siswa yaitu hanya 15 % yang menjawab tahu. Mereka yang menjawab tahu di antaranya mengatakan pemilu adalah bentuk demokrasi sedangkan 85% siswa menjawab tidak tahu. Setelah sosialisasi dan disampaikan kepada siswa bahwa sebagai negara demokrasi maka Indonesia wajib menyelenggarakan pemilu dan pemilu yaitu pilkada, pilpres dan pileg merupakan wujud dari demokrasi. Setelah sosialisasi maka terdapat 80% siswa yang menjawab tahu.

Tentang kedaulatan rakyat tidak banyak dipahami oleh siswa, hanya sekitar 13 %, namun setelah sosialisasi terdapat 71 % siswa yang memahami apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat.

Sedangkan keterkaitan antara kedaulatan rakyat dengan pemilu juga tidak banyak dipahami, hanya 13 % siswa yang memahami, namun setelah sosialisasi siswa yang menjawab tahu mencapai 65 %. Pemahaman tentang kedaulatan rakyat tentu dibutuhkan bagi para pemilih guna memotivasi mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Karena hak pilih merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Bahwa yang menjadi penguasa dalam suatu negara demokrasi adalah orang yang dipilih oleh rakyat mayoritas, di mana melalui pemilu dengan sadar dia memilih dan menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur hidup bersama (bernegara).

Pengetahuan tentang tujuan pemilu nampaknya telah cukup banyak dipahami oleh siswa. Sebelum kegiatan sosialisasi terdapat 65% siswa mengetahuinya, beberapa di antaranya menyebutkan pemilu adalah memilih pemimpin, ada yang

menjawab memilih pemimpin daerah, ada yang menyebut memilih presiden.

Adapun pengetahuan siswa tentang apa yang dimaksud dengan pilkada, sebelum sosialisasi mencapai 48 % setelah sosialisasi terdapat 94 % yang menjawab tahu yaitu memilih kepala daerah.

Sebelum sosialisasi hanya terdapat 23% siswa yang menjawab tahu apa yang dimaksud dengan golongan putih (golput) sedangkan 77 % siswa menjawab tidak tahu. Dari siswa yang menjawab tahu mengatakan golput adalah orang yang tidak bertanggung jawab dalam pencoblosan. Namun hal tersebut dikategorikan sebagai bagian yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan golput. Karena sebagaimana yang dikatakan Arbi Sanit di atas bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan. Atau sebagaimana dikatakan Novel Ali di atas, kelompok golput yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai atau menginginkan adanya organisasi politik lainnya, kemampuan mereka telah sampai pada tingkat evaluatif. Setelah sosialisasi, siswa yang menjawab tahu apa yang dimaksud golput mencapai 92%.

Pemahaman apa yang merupakan tindakan golput hanya diketahui sekitar 23% dari siswa, namun setelah sosialisasi meningkat menjadi 88 % siswa yang memilih jawaban dan benar. Dalam sosialisasi disampaikan apa saja yang termasuk dalam golput (sebagaimana konsep di atas), tidak mendatangi kotak suara karena kesadaran tidak ada yang patut untuk dipilih juga termasuk golput, dengan syarat memang punya kemampuan evaluative. Namun ketika enggan mendatangi kotak suara karena tidak peduli atau tidak mengetahui manfaatnya maka tidak dapat dikatakan golput. Tepatnya golput adalah orang yang mendatangi TPS namun mencoblos bagian

putih pada kertas, bukan pada tanda gambar.

Makna partisipasi sebagai bentuk keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik nampaknya tidak banyak dipahami siswa. Hal ini terlihat dari sedikitnya (13%) siswa yang menjawab tahu apa yang dimaksud dengan partisipasi politik. Setelah sosialisasi dimana dijelaskan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara termasuk para siswa yang telah punya hak pilih untuk ikut memilih atau menggunakan hak suaranya dalam pemilu/pilkada maka terdapat peningkatan siswa yang menjawab tahu menjadi 85 %.

Demikian juga halnya dengan pemahaman tentang kaitan partisipasi politik dengan pemilu. Sebelum sosialisasi hanya 10 % yang menjawab tahu. Setelah sosialisasi terdapat 73 % siswa yang menjawab tahu. Dalam sosialisasi tersebut siswa dijelaskan bahwa pemilu adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik. Dalam penjelasan tersebut juga diuraikan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya (selain turut memberi suara dengan mendatangi TPS) yang dapat dilakukan siswa dalam pemilu, di antaranya turut menjadi pengawas TPS (melalui kecamatan atau partai), saksi dalam penghitungan suara, atau turut dalam kegiatan kampanye.

Adapun mengenai pengetahuan siswa tentang tujuan partisipasi, sebelum sosialisasi hanya terdapat 7%, setelah sosialisasi meningkat menjadi 80%. Dalam sosialisasi diuraikan makna partisipasi, tujuan partisipasi dan lainnya. Konsep partisipasi politik memang tidak lazim terdengar sehari-hari, setidaknya demikian yang diakui siswa ketika ditanyakan secara informal dalam bincang-bincang, dan ketika dijelaskan bahwa salah satu bentuk partisipasi adalah pemilu beberapa diantaranya mengangguk bahkan mengatakan “ooo itu artinya”. Namun ketika diuraikan tujuan dari partisipasi politik adalah mempengaruhi pengambilan

keputusan ataupun kebijakan, mereka hanya terdiam. Dan usai sosialisasi dan disebar kuesioner kembali maka terdapat 65% yang menjawab mengetahui tujuan dari partisipasi.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman siswa tentang pemilihan pemula, pemilu, dan hal-hal terkait mengalami peningkatan setelah mereka menerima sosialisasi dari tim sosialisasi. Dalam diskusi dan bincang-bincang dengan siswa terdapat beberapa hal yang dapat menjadi masukan bagi kegiatan PKM ini mendatang, antara lain

Guru dan orang tua sangat berperan dalam membentuk pandangan siswa tentang calon-calon yang akan maju dalam pilkada. Hal ini nampak jelas ketika siswa ditanyakan siapa calon yang paling mereka kenal dari lima calon yang tim tampilkan. Siswa serempak menjawab Ade Yasin, sebagaimana diketahui Ade Yasin adalah adik kandung dari Rahmat Yasin yang merupakan mantan Bupati Bogor dua periode, namun tahun kedua dimasa periode kedua, Rahmat Yasin ditangkap KPK dengan kasus korupsi dan ditahan di rutan KPK di Bandung. Sebelumnya Rahmat Yasin adalah ketua DPRD kabupaten Bogor selama dua periode. RY juga merupakan ketua PPP kab. Bogor. RY adalah tokoh masyarakat di kab. Bogor dan dikenal luas di kalangan elit lokal kab. Bogor.

Siswa tidak bergeming ketika ditawarkan nama calon lain beserta prestasi sang calon. Nampak pemahaman yang ditanamkan orang tua dan guru begitu melekat pada siswa bahwa Ade Yasin adalah calon yang tepat tanpa perduli Ade Yasin adalah adik dari Rahmat Yasin yang terciduk KPK. Meski dalam kegiatan sosialisasi tim telah menjelaskan dengan konsep “jangan seperti beli kucing dalam karung” ternyata dari pernyataan siswa menunjukkan yang akan mereka pilih adalah justru bagian dari keluarga yang

telah terbukti mengkorup uang rakyat. Hal ini terbukti dengan kemenangan Ade Yasin pada Pilkada Kab. Bogor Juni 2018. Dari ungkapan mereka yang dengan serentak akan memilih Ade Yasin, mereka nampak begitu bangga dengan pilihan mereka.

Dalam kegiatan sosialisasi tim hanya dapat menjelaskan secara umum tentang pentingnya mengenal calon-calon yang akan dipilih dengan cara mencari sendiri informasi tentang *track record* atau jejak rekam para calon dan tidak mungkin menyinggung tentang para calon itu sendiri sehingga tim tidak terjebak dalam kampanye terselubung. Meski dari hasil pengamatan dan penelitian tim mengetahui jejak rekam Rahmat Yasin yang disinyalir membangun dinasti politik guna melindungi kepentingan-kepentingannya namun tim tidak menyinggung hal itu sama sekali dan hanya meminta siswa untuk mengenal para calon dari sumber-sumber yang dapat mereka jangkau.

Tidak cukup hanya sekali kegiatan PKM dilakukan dalam rangka memberi pemahaman tentang pentingnya pemilu dan pentingnya memilih calon yang bersih. Hal ini karena pemilih pemula sebagai pemilih dalam jumlah yang cukup banyak dianggap belum memiliki orientasi politik yang pasti bahkan mungkin cenderung pasif atau kurang hirau mengenai kualitas atau jejak rekam dari para caleg atau kepala daerah. Pemahaman siswa-siswi tentang pemilihan umum baik pilpres, pileg maupun pilkada secara umum sangat mendasar. Sekitar 50 % siswa memang menjawab tahu tentang pemilu, pilkada, dan tujuan pemilu. Namun sebagai pemilih pemula sebaiknya siswa-siswa tidak sekedar tahu hal yang mendasar namun dapat mengetahui dan memahami makna dari pemilu itu sendiri sebagai sebuah hak warga negara di negara demokrasi dan berdaulat.

Materi sosialisasi untuk berikutnya akan lebih diperkaya dengan pemahaman

tersebut dan pemahaman tentang kendala-kendala dalam mendapat pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, antara lain tentang *money politic*, *black campaign*, serta pentingnya mengenal caleg, capres secara objektif agar siswa tidak salah pilih hingga memilih koruptor atau orang-orang yang berpotensi menjadi koruptor.

V. Kesimpulan

Dari uraian tentang kegiatan PKM di SMK Mandiri Bojonggede Kabupaten Bogor kiranya dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemilih pemula belum memiliki pemahaman yang cukup tentang keberadaan atau posisi mereka sebagai pemilih dalam pemilu yang akan berlangsung kemudian. Pemahaman mereka juga masih kurang tentang tujuan dari pemilu, atau pemahaman tentang pemilu sebagai wujud dari demokrasi. Pemahaman-pemahaman tersebut diperlukan guna memotivasi pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam pemilu.

Setelah dilakukan sosialisasi kepada siswa-siswa terdapat peningkatan terhadap pemahaman mereka tentang pemilu, tujuan pemilu dan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan sosialisasi kepada pemilih pemula sangat bermanfaat dan diperlukan guna meningkatkan pemahaman siswa para pemilih pemula tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam pemberian suara dalam pemilu.

Tinjauan Pustaka

- Budiarjo, Miriam. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Sukriono. (2009). "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," Jurnal Konstitusi, vol.2(1).
- Setiadji. (2011). "Orientasi Politik Yang Mempengaruhi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus: Pemilih Pemula Di Kota

Semarang),” Integralistik, vol.22(1).

Sumber lain:

<https://amp-tirto.id/cdn.amproject.org>

[http://apssi-sosiologi.org/wp-content/
uploads/2014/11/Prosiding-sosiologi-](http://apssi-sosiologi.org/wp-content/uploads/2014/11/Prosiding-sosiologi-)

Pemuda-dan-Pemilih-Pemula

<http://golputbukandos.blogspot.co.id>

[http://kpud cilacapkab.go.id/
assets/dataweb/berkas/2016/
penyuluhanpemilihpemula2015](http://kpudcilacapkab.go.id/assets/dataweb/berkas/2016/penyuluhanpemilihpemula2015)

<http://dictio.com>